

Dinamika Civil Society dalam Politik Elektoral: Kontribusi NWDI terhadap  
Kemenangan Zul Rohmi di Pilkada NTB 2018.

Muh. Samsul Anwar

Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) Pancor  
anwarlombok20@gmail.com

Muhammad Fariqh Khatami  
Ketua IMSAK JAKARTA

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang peran Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) dalam kemenangan pasangan Zulkiflimansyah-Siti Rohmi Djalillah (Zul-Rohmi) pada Pilkada NTB 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran NW dalam kemenangan Zul-Rohmi dan alasan NW menempatkan kadernya sebagai Cawagub. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori civil society, partai politik, dan Pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan peran signifikan NWDI sebagai civil society dalam kontestasi politik (Pilkada) 2018. Dalam Pilkada tersebut, pasangan Zul-Rohmi yang didukung oleh NWDI dapat memenangkan kontestasi. Pengaruh ketokohan pemimpin organisasi NWDI memiliki peran besar dalam menggaet suara. Keberadaan Tuan Guru Bajang (TGB) yang merupakan pemimpin NWDI memiliki pengaruh yang kuat dalam memobilisasi jemaahnya untuk memilih Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalillah. Pengaruh TGB juga terlihat dalam kontestasi periode sebelumnya yang juga memenangkan Pilkada Provinsi NTB. Adapun alasan NWDI menempatkan kadernya sebagai calon wakil gubernur, bukan sebagai calon gubernur, adalah dikarenakan kondisi sosio kultural masyarakat NTB yang masih menganut budaya patriarki yang tidak menghendaki pemimpin perempuan dan faktor pengalaman kadernya.

Kata Kunci: Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah, civil society, Pilkada NTB, Tuan Guru Bajang.

Pendahuluan

Konsep masyarakat madani memiliki hubungan yang erat dengan demokrasi. Peran *civil society* memiliki peran sebagai penyeimbang kekuatan negara artinya meminimalisir dominasi negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dikarenakan memang konsep *vox populi vox dei* menjadi pondasi kuat dari sistem demokrasi. Karena hal itu yang membuat demokrasi kuat dan bertahan lama di Amerika. Jadi *civil society* menjadi bagian kunci yang menjadi prasyarat terjadinya konsolidasi demokrasi.<sup>1</sup> Nurcholish Madjid juga berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi* mengatakan bahwa jika demokrasi itu memiliki sebuah rumah maka rumah tersebut adalah *civil society* atau masyarakat madani karena di dalam *civil society* terdapat berbagai macam kelompok, perserikatan, partai dll bergabung untuk menjadi tameng antara negara

---

<sup>1</sup> M Algappa, *Civil society And Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space*. (USA: Stanford University Press, 2004) h. 122

dan warga negara.<sup>2</sup>

Pilkada merupakan salah satu bentuk implementasi pelaksanaan kedaulatan rakyat yang ada di daerah. Hal ini merupakan bentuk metamorfosa penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dikenal dengan prinsip otonomi daerah artinya adalah setiap pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus urusan daerahnya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 2. Pilkada merupakan bentuk sarana pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dan DPRD yang dipilih secara langsung oleh rakyat di daerahnya. Pada akhirnya kepala daerah dan DPRD yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya di daerah dapat menjadi representasi pilihan rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat serta memiliki legitimasi yang kuat jika Pilkada dilaksanakan secara demokratis berdasarkan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Di dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Indonesia selain partai politik yang terlibat langsung dalam arena pertarungan demokrasi, ada juga kelompok-kelompok kepentingan yang memang memiliki basis massa yang cukup kuat. Dalam lingkup perpolitikan nasional contohnya adalah NU dan Muhammadiyah yang memiliki basis massa yang tersebar hampir merata di setiap daerah terutama di pulau Jawa. Namun ketika kita berbicara Nusa Tenggara Barat yang menjadi titik fokus penelitian ini ada kelompok yang mirip dengan NU dan Muhammadiyah yaitu Nahdlatul Wathan atau disingkat NW.

NW lahir dalam masa pembangunan pasca kemerdekaan yaitu 8 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Pendirinya yang merupakan ulama tersohor di Nusa Tenggara Barat yaitu TGKH Zainuddin Abdul Majid. Arah gerak organisasi ini yang berfokus pada bidang sosial keagamaan dan dakwah Pendidikan membuat organisasi ini berkembang begitu pesatnya di bumi *sasak* Nusa Tenggara Barat yang berakibat pada banyaknya pengikut atau jamaahnya. Pergerakan dakwah NW yang masif diseluruh penjuru NTB melalui pondok pesantrennya membuat NW menjelma sebagai organisasi massa yang diperhitungkan dalam kontestasi politik lokal NTB.

Pilkada 2008 di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan proses pembuktian NW sebagai salah satu kekuatan politik lokal yang berperan penting dalam memobilisasi massa. NW menempatkan tokohnya di Ring NTB I pada Pilkada 2008. Tuan Guru Bajang panggilan akrab KH. M. Zainul Majdi, MA. Beliau adalah gubernur terpilih pada Pilkada tahun 2008. Latar belakangnya sebagai cucu Maulana Syekh semakin memperkuat pamornya sebagai tokoh pendatang baru. *Bajang* dalam bahasa Sasak itu berarti muda bukan tanpa alasan pemberian nama itu disematkan kepada beliau karena usia beliau pada saat itu menginjak umur 36 tahun.

KH. M. Zainul Majdi pada kontestasi Pilkada 2008 di NTB berpasangan dengan Ir. H. Badrul Munir, MM. memperoleh suara terbanyak sebesar 847.976 kemudian disusul oleh gubernur *Incumbent* Drs. H. Lalu Serinata-H.M Husni Djibril, B.Sc. dengan perolehan suara sebanyak 576.123. Selanjutnya pasangan Dr. H. Zainy Arony, M.Pd-Nurdin Ranggabarani dengan perolehan suara 387.875 dan di posisi terakhir ada pasangan Ir. H. Nanang Samodra KA, M.Sc-Muhammad Jabir, SH. MH. dengan perolehan suara 370.919. Data tersebut merupakan hasil rekapitulasi suara oleh KPU Kota Bima.

Dalam satu dekade terakhir dinamika Pilkada di NTB mulai tahun 2008 hingga

---

<sup>2</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*. (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 145

<sup>3</sup> Prayudi dkk, *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017) h. 2

2018, NW memainkan peran penting dibalik keberhasilan TGB dalam merebut dan mempertahankan tongkat estafet kepemimpinan Nusa Tenggara Barat. Sementara menjelang Pilkada 2018 banyak sekali spekulasi terkait mau dibawa kemana tongkat estafet kepemimpinan NTB selanjutnya. Apakah NW akan menempatkan kembali tokoh mereka untuk melanjutkan tampuk kekuasaan yang ditinggalkan Gubernur sebelumnya dalam hal ini Tuan Guru Bajang.

Suatu hal yang menarik ketika nama Siti Rohmi Djalillah muncul pada bursa pencalonan NTB satu. Ini merupakan sebuah jawaban dari banyaknya spekulasi terkait siapa dan kemana arah dukungan NW selanjutnya. Bukan tanpa alasan mengingat Siti Rohmi merupakan nama yang tidak asing lagi ditelinga para kalangan NW karena beliau merupakan kakak kandung dari TGB dan juga merupakan cucu Syekh Zainuddin Abdul Madjid.

Pada Pilkada 2018 terdapat empat bakal calon salah satunya adalah Siti Rohmi yang digandeng oleh Zulkieflimansyah untuk menjadi pasangannya. Bakal calon ini tentunya mengejutkan semua pihak pasalnya nama Zulkieflimansyah kurang begitu populer di masyarakat NTB. Bukan tanpa sebab memang beliau lahir di Sumbawa salah satu wilayah di NTB. Namun karir politiknya dibangun di daerah Banten bahkan ketika beliau mengikuti kontestasi di NTB pada saat yang bersamaan beliau adalah anggota DPR RI Dapil Banten II. Tentunya ini menjadi sesuatu yang menarik. Banyak pertanyaan timbul mengapa harus Zulkieflimansyah yang notabenehnya tidak populer serta mengapa NW merelakan ring NTB satu ditempati oleh orang yang bukan dari kalangan mereka yang telah mereka kuasai selama satu dekade terakhir.

Ketika rekapitulasi suara dilakukan oleh KPU Provinsi NTB nama pasangan nomor urut tiga yaitu Zulkieflimansyah-Siti Rohmi memperoleh suara tertinggi dengan perolehan 811.945 suara disusul oleh pasangan nomor urut satu Suhaili-Amin dengan perolehan suara 674.602 kemudian di posisi ketiga ditempati oleh pasangan nomor urut dua Ahyar Abduh-Mori Hanafi dengan memperoleh 637.048 suara dan di posisi terakhir ditempati oleh pasangan calon nomor urut empat Ali BD-Sakti dengan perolehan 430.007 suara.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk terhadap penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif digunakan untuk mempermudah penulis dalam menjelaskan data dan fenomena terkait bagaimana peran NWDI dalam kemenangan Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalillah pada Pilkada NTB 2018 secara mendalam dan komperhensif. Jenis serat metode penelitian tersebut juga dipilih karena dinilai bisa menjelaskan serta mampu menunjang segala kebutuhan penulis yang akan menjawab pertanyaan penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan cara menjelaskan, menganalisis serta nmenginterpretasikan data yang diperoleh dengan apa adanya dan komperhensif.<sup>4</sup> Serta untuk mendukung penelitian dalam menganalisis data ini menggunakan, *literature review*, dan wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

---

<sup>4</sup>Septiawan Santana K., *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 5

## Peran Nadhlatul Wathan dalam Kemenangan Zulkieflymansyah-Siti Rohmi Djalillah

Lengsernya rezim Soeharto pada era Orde Baru menyebabkan peta politik lokal di Indonesia berubah drastis. Termasuk di dalamnya perubahan struktur politik, perubahan polarisasi dan kekuatan politik di dalam masyarakat. Bahkan, membuat Zainal Abidin Amir menyatakan bahwa politik Indonesia mengikuti pola politik Indonesia yang klasik seperti disampaikan oleh Geertz pada tahun 1950-an, yaitu Islam santri versus abangan dan priayi. Di tingkat daerah, kebebasan politik, demokrasi dan desentralisasi politik telah menjadi kekuatan politik dan gerakan sosial yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga Lombok. Begitu juga dinamika politik, telah memasuki babak baru, aktor, institusi, dan budaya bermunculan memainkan peran dalam tingkatan lokal bahkan aktor-aktor lokal yang memiliki simbol kultural lokal kembali dalam panggung politik.<sup>5</sup>

Konsep masyarakat madani yang memiliki hubungan dengan sistem demokrasi di Indonesia.<sup>6</sup> Peranan *civil society* memiliki andil yang cukup besar sebagai penyeimbang kekuatan negara dalam meminimalisir dominasi negara untuk mencapai tujuan negara yaitu, mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dikarenakan memang adanya sebuah konsep yang mengatakan bahwa “*vox populi vox dei*” merupakan dasar dan yang menjadi pondasi kuat dari sebuah sistem demokrasi ketika demokrasi itu berasal dan berakhir untuk rakyat. Karena hal tersebut yang akan menjadikan suatu sistem demokrasi yang kuat dan bertahan lama, seperti di Amerika. Jadi *civil society* atau rakyat akan menjadi bagian terpenting serta yang menjadi prasyarat terjadinya konsolidasi dalam sebuah demokrasi.<sup>7</sup> Cak Nur juga berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, menyatakan bahwa apabila sebuah demokrasi tersebut memiliki sebuah rumah, maka rumah tersebut adalah *civil society* atau masyarakat itu sendiri. Dikarenakan dalam *civil society* terdapat berbagai macam kelompok, perserikatan, partai, organisasi dan lain sebagainya yang bergabung untuk menjadi jembatan antara negara dengan warga negara.<sup>8</sup>

Seiring dengan berjalannya waktu, zaman, dan peradaban umat manusia yang terus berkembang yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dengan kata lain masyarakat berkembang dikarenakan pengaruh dari modernisasi justru mengakibatkan pengaruh yang cukup besar juga dalam bidang perkembangan politik di era modern ini. Akan tetapi, perkembangan yang terus mengarah ke arah yang modern ini justru berbanding terbalik dengan perkembangan arus perpolitikan di Indonesia. Arah demokratisasi yang akhir-akhir ini di lancarkan oleh para elit politik justru malah menyasar struktur masyarakat yang malah dianggap tradisional seperti, pondok pesantren, kiai, ormas agama, dan lain sebagainya yang bersifat rohanian.<sup>9</sup>

Keterlibatan kiai atau pemuka agama dalam politik justru menimbulkan masalah

---

<sup>5</sup> Muh. Samsul Anwar, *Dinamika Peran Politik Tuan Guru di Lombok Era Reformasi*, (Jakarta: Cinta Buku Media Cet. 1, 2006) 1

<sup>6</sup> Rais, *Demokrasi dan Proses Politik...*

<sup>7</sup> M. Alagappa, *Civil Society and Political Change in Asia*, (Stanford: Stanford University Press 2004) 33.

<sup>8</sup> Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina 1999) 12

<sup>9</sup> M. Syamsuddin, “Kiai Dan Politik: Keterlibatan Kiai Madura Dalam Politik Praktis,” *Sosiologi Reuektif* 7 (2) (2013): 47-71.

baru dan berdampak negatif pada diri seorang kiai yang dianggap sebagai pengalih fungsi kenabian. Hal ini dikarenakan setiap ulama atau kiai harus mampu mengemban misi para nabi dan sekaligus menjadi tauladan dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan dan segala tindak tanduk dari seorang kiai akan senantiasa dipatuhi oleh jemaahnya karena seorang ulama tersebut dianggap sebagai pengalih fungsi kenabian. Itulah yang menyebabkan ulama atau kiai sering mengambir peran sebagai figur yang menentukan pergumulan umat Islam dengan masalah pemerintahan, politik, sosial kultural dan Pendidikan.<sup>10</sup>

Fenomena sosial politik tersebut jika dikaji melalui teori sosiologi memang sangatlah relevan adanya. Dijelaskan dalam teori perilaku memilih (*voting behaviour*) bahwa perilaku memilih merupakan sifat alamiah manusia yang membedakan manusia satu dengan yang lain, tingkah laku dari seorang individu dalam pemungutan suara disebut dengan konsep perilaku memilih. *Voting behaviour* sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu salah satunya adalah kepercayaan terhadap seseorang yang dianggap sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat.<sup>11</sup>

Pengaruh seorang tokoh agama dalam kontestasi politik tersebut sangat relevan jika dibedah juga dengan menggunakan teori Mazhab Kolumbia, yang mana teori ini merupakan bentuk tertua dari lingkup kajian perilaku memilih karena teori ini lahir paling awal dari lingkup kajian perilaku memilih masyarakat tersebut. Teori ini disebut sebagai Mazhab Kolumbia dikarenakan teori ini lahir pada tahun 1950an dan berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld yang dilakukan di Universitas Kolumbia pada 1940.<sup>12</sup>

Satu dekade terakhir dinamika Pilkada NTB dimulai sejak tahun 2008 hingga saat ini, ketokohan sosok kiai dengan sebutan Tuan Guru dengan basis masa atau jemaah dengan nama Nahdatul Wathan Diniyah Islamiyah atau NWDI memiliki peran yang sangat penting dibalik keberhasilan dan suksesnya seseorang yang akan menjadi Gubernur di NTB.

NWDI sangat erat kaitannya dengan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang merupakan sosok yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional yang berasal dari NTB. Meskipun telah tiada, nama baik serta doktrin-doktrin yang tertanam didalam Masyarakat tentang sosoknya beserta anak cucunya adalah menjadi suri tauladan bagi Masyarakat di NTB khususnya di Lombok. Pengaruh dari NWDI sebagai organisasi *Civil Society* sangat berpengaruh terhadap arah perpolitikan di NTB.

Pengaruh NWDI yang memiliki basis masa sangat besar dan patuh dalam melaksanakan perintah beserta arahan dari tokoh-tokoh NWDI yang sering disebut sebagai Tuan Guru sangat mempengaruhi pilihan Masyarakat terhadap calon pemimpin. Hal tersebut terbukti 15 tahun terakhir dengan tetap berkuasanya keturunan dari TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sebagai pendiri NW dan NWDI membuktikan kedikdayaan pengaruh NWDI dalam menentukan arah pilihan masyarakat.<sup>13</sup>

Kemenangan Zulkieflymansyah-Siti Rohmi Djalillah pada Pilkada NTB 2018

---

<sup>10</sup> Rosehan Anwar, *Ulama Dalam Penyeberangan Pendidikan Dan Hazanah Keagamaan* (Jakarta: Ulama dalam penyeberangan pendidikan dan hazanah keagamaan, 2003).

<sup>11</sup> Matthew J. Streb, *Rethinking American Electoral Democracy, Third Edition, Rethinking American Electoral Democracy, Third Edition*, 2016, <https://doi.org/10.4324/9781315720722>.

<sup>12</sup> M. L Bartels, *The Study of Electoral Behavior. Department of Politics and Woodrow Wilson School of Public and International Affair* (Princeton: Princeton University, 2008).

<sup>13</sup> Gea Putra Disna Mahardika, Muhammad Fariqh Khatami, "Pengaruh Ketokohan Pemuka Agama Dalam Politik Elektoral Daerah Nusa Tenggara Barat," *Realism: Law Review*, 2023.

tidak dapat dipisahkan dari peran NWDI dengan sosok TGB. Muhammad Zainul Majdi dibelakangnya. Hal tersebut dikarenakan dalam masyarakat Sasak, Lombok, yang masih sangat tradisional, bergantung pada apa dan bagaimana pengaruh ajaran yang disampaikan oleh Tuan Guru yang dijadikan sebagai percontohan dalam kehidupan masyarakat. Kepatuhan terhadap setiap perkataan Tuan Guru, yang dianggap menjadi tuntunan untuk mereka hidup karena Tuan Guru dianggap sebagai cerminan fungsional kenabian sehingga masyarakat jemaah mereka didoktrin untuk senantiasa bersikap *sami'na wa ato'na* atau mendengar perintah serta mematuhi setia ucapan yang keluar dari sang Tuan Gurunya.<sup>14</sup>

Secara karakteristik masyarakatnya, masyarakat muslim suku Sasak, NTB masih dominan berbudaya tradisional, masih memiliki kesadaran yang bersifat paternalistik, serta masih memiliki mental agraris yang sangat kuat.<sup>15</sup> Oleh karena hal tersebut sosok Tuan Guru menjadi entitas yang sangat menentukan terhadap wacana atau haluan yang bersifat keagamaan, sosial, pemerintahan, bahkan hingga haluan politik. Ketokohan yang melekat pada gelar "Tuan Guru" itu sendiri bahkan turun hingga garis keturunannya dan bahkan kualitas ucapannya sama didengarnya oleh Jemaah sama halnya mendengar ucapan dari garis keturunan sebelumnya atau ayah dari sang "Tuan Guru".

NWDI juga sebagai organisasi yang memiliki basis massa yang militan sampai ke akar rumput. Namun tak bisa dipungkiri memang kuantitas dari jemaah NW menurut keterangan Ihsan Hamid kurang lebih mencapai 600-800 ribu jemaah tidak diketahui angka pastinya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemenangan Zulkieflymansyah-Siti Rohmi Djalillah apalagi mengingat sifat jemaah NWDI yang militan dan *sami'na waato'na* apa yang dikatakan oleh pemimpin mereka.<sup>16</sup>

Dapat dikatakan kemenangan Zulkieflymansyah-Siti Rohmi Djalillah pada Pilkada NTB 2018 kian mempertegas andil dari kedikdayaan NWDI. Ditambah lagi pasangan calon tersebut merupakan penggabungan antara Lombok-Sumbawa.<sup>17</sup>

### TGB Effect

TGB dan NWDI tidak dapat dipisahkan secara ideologis dan struktural. Ketokohnya sebagai pemimpin organisasi keagamaan dan pemerintahan tidak lepas dari nama besar kakek beliau yaitu Syekh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Bahkan ketika beliau selesai menjabat sebagai Gubernur NTB 2 periode tidak melepaskan pengaruh beliau sebagai pemimpin. Tidak dapat dipungkiri kemenangan pasangan Zulkieflymansyah-Siti Rahmi Djalillah tidak lepas dari manuver yang dilakukan oleh mantan Gubernur NTB ini.

Menurut TGH Azhari seorang pengurus NWDI sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Darul Abidin memberikan suatu istilah terhadap peran TGB terhadap

---

<sup>14</sup> Fahrurrozi Dahlan, *Sejarah Perjuangan Dan Pergerakan Dakwah Islamiyah Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli Di Pulau Lombok* (Jakarta: Sentra Media, 2006).

<sup>15</sup> Fawaizul Umam, "Ulumuna, Volume XIII Nomor 2 Desember 2009 433 TERA ULANG PERAN PROFETIK TUAN GURU DALAM KONTEKS KEBEBASAN BERAGAMA DI PULAU LOMBOK," *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6, no. August (2016): 128.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Narasumber Dr. Ichsan Seorang Pengamat Politik UIN Mataram, Dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2024 Via Zoom Meeting

<sup>17</sup> Wawancara dengan Narasumber Dr. Ihsan, M.A. Pol., Seorang Pengamat Politik UIN Mataram, Dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2024 Via Zoom Meeting

kemenangan Zulkieflyamnsyah-Siti Rahmi Djalillah yaitu “*TGB Effect*”. Bukan tanpa sebab beliau kembali menerangkan bahkan sebelum TGB ‘turun gunung’ pasangan Zulkieflymansyah-Siti Rohmi Djalillah kurang populer bahkan dikalangan jamaah NWDI sendiri. Namun setelah TGB turun langsung untuk mensosialisasikan dan mengajak para jamaah untuk memilih pasangan yang dikenal dengan tagline coblos jilbab ijo membawa perubahan yang signifikan. Pasangan ini memang dari awal kurang diperhitungkan sebab kedua calon ini kurang populer di mata masyarakat NTB.<sup>18</sup> Tetapi orang lupa siapa yang ada dibalik layar kedua pasangan ini. Bahkan beberapa bulan sebelum pencoblosan TGB *all out* dengan datang ke setiap acara-acara pengajian jamaah NWDI, sehari bisa 5-6 titik yang didatangi. Karena memang daya tarik pemimpin kharismatik ini membuat para jamaah berbondong-bondong untuk datang mengikuti pengajian yang dihadiri oleh TGB. Tanpa bayaran, iming-iming dan paksaan, memang murni militansi dan pengaruh ketokohan TGB.<sup>19</sup>

Selain itu juga menurut keterangan Ihsan Hamid pengaruh TGB sebagai *role model* untuk preferensi pilihan pada pilgub NTB 2018 masih sangat kuat. Singkatnya apa yang TGB pilih itu yang diikuti oleh Masyarakat. Tak lupa juga TGB sebagai seorang mantan gubernur NTB 2 periode tentunya mempunyai pengaruh yang besar terhadap birokrasi dan masyarakat NTB untuk memenangkan Zulkieflyamnsyah-Siti Rahmi Djalillah.<sup>20</sup>

### Faktor-Faktor yang Mendasari NW Menempatkan Kadernya di Posisi Wakil Gubernur

Ketika menjelang suksesi kepemimpinan Gubernur NTB tahun 2018, kondisi perpolitikan daerah NTB semakin memanas. Ada banyak nama-nama besar yang mulai diisukan serta balihonya sudah bertebaran sepanjang jalan provinsi dan kabupaten di NTB. Ada nama Suhaili Fadhil Thohir yang saat itu menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah juga merupakan jagoan dari Partai Golkar kemudian nama Tuan Guru Haji Ahyar Abduh yang saat itu menjabat sebagai Walikota Mataram kemudian ada nama Politisi senior sekaligus Bupati Lombok Timur Ali BD yang ikut meraimakan Bursa Cagub NTB. Terakhir Politisi nasional yang juga merupakan Putra NTB Dr. Zulkieflimansyah ikut meramaikan kontestasi Pilgub.

Sementara yang menjadi menarik dalam konstelasi perpolitikan NTB pada tahun 2018 lalu yaitu masyarakat menantikan siapakah sosok dari kalangan NWDI yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan TGB. Kemudian nama Siti Rohmi Djalillah santer dibicarakan semua kalangan masyarakat bahkan di berbagai kalangan pembicaraan terkait majunya Siti Rohmi banyak yang mengunderestimate sosok kakak kandung TGB ini. Bukan hanya kapasitas dan pengalamannya saja tetapi juga beliau hanyalah seorang perempuan yang akan melawan nama-nama besar dan berpengalaman sebagai pemimpin eksekutif.

Sebagian kalangan NWDI masih percaya diri karena masih meyakini pengaruh TGB masih kuat. Hal itu berbanding terbalik dengan keadaan di lapangan pada saat itu. Menurut keterangan Samsul Anwar yang merupakan saksi hidup dan tim sukses yang

---

<sup>18</sup>Wawancara TGH Azhari, LC., Pengurus NW, Dilaksanakan pada Tanggal 12 Agustus 2023 di Lombok Timur.

<sup>19</sup>Wawancara TGH Azhari, LC Pengurus NW sekaligus Pengasuh Pondok Darul Abidin, Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Dilaksanakan pada tanggal 4 Januari, 2024 via telepon

<sup>20</sup> Wawancara Dr Ihsan, M.A. Pol seorang Pengamat Politik UIN Mataram. Dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2024, Via Zoom Meeting.

terlibat langsung dalam proses kemenangan pasangan calon yang akrab dikenal sebagai Zul-Rohmi itu menuturkan bahwa pada saat itu dalam internal organisasi NWDI melakukan survei untuk mengukur sejauh mana kekuatan Siti Rohmi pada saat itu, ternyata sebagian besar masyarakat NTB tidak menghendaki pemimpin perempuan. Haruslah seorang laki-laki yang menjadi pemimpin singkatnya sebagian besar masyarakat NTB masih Patriarki. Melihat hasil survei dan karakteristik masyarakat NTB yang patriarki membuat Siti Rohmi legowo untuk menjadi calon wakil gubernur.<sup>21</sup>

Setelah mengetahui hasil survei tersebut berubahlah strategi NWDI agar tetap memajukan calonnya namun mengisi posisi calon wakil gubernur. Siti Rohmi yang pada saat itu maju melalui Partai Demokrat pada awalnya menurut keterangan Anwar bahwa penajakan koalisi gencar dilakukan dengan Suhaili Fadhil Thohir. Pasangan Suhaili-Rohmi dinilai menjadi pasangan potensial. Tetapi drama-drama politik terjadi, komunikasi yang intens bukan berarti menjadi jaminan terwujudnya koalisi. Siti Rohmi dan Partai Demokrat ditinggalkan oleh Suhaili yang lebih memilih Muhammad Amin dari Partai Nasdem yang juga eks Wakil Gubernur NTB yang menjadi tandem TGB pada pilkada 2013 untuk menjadi wakilnya. Namun komunikasi terus dilakukan oleh pihak Rohmi sehingga pada akhirnya perjodohan antara PKS dan Demokrat terjadi. Bukan tanpa alasan karena pada saat itu hanya PKS yang masih membuka komunikasi dibanding partai-partai lain yang sudah memiliki preferensi jagoannya masing-masing. Sehingga pada tanggal 1 Januari 2018 pasangan Zulkieflimansyah dan Siti Rohmi Djalillah resmi di deklarasikan oleh PKS dan Demokrat. Zul-Rohmi dianggap sebagai kombinasi yang lengkap antara pengalaman dan kompetensi yang dimiliki keduanya.

## 1. Budaya Patriarki

Ketika melihat rekam jejak historis bangsa Indonesia memang terkenal dengan budaya patriarkinya yang mengakar. Sejak Indonesia masih berbentuk kerajaan budaya patriarki sudah lestari di dalam sosio kultural bangsa Indonesia. Laki-laki selalu mendominasi setiap ruang-ruang publik atau pun pemerintahan. Perempuan biasanya hanya menunggu di rumah, menjadi selir raja-raja bahkan bahasa kasarnya sebagian dijadikan budak.

Pada hakikatnya paradigma yang terbangun tentang budaya patriarki dibangun atas dasar persepsi paternalis yang menganggap laki-laki dalam suatu sistem sosial menjadi bagian penentu terbentuknya fungsionalisme hirarki keluarga. Dalam konsep paternalis laki-laki digambarkan sebagai sebuah simbol kepemimpinan dalam hubungan keluarga ibu dan anaknya yang menciptakan suatu dinamika sosial yang kompleks.<sup>22</sup>

Prinsip ini menyatakan bahwa dalam masyarakat yang menganut struktur sosial tertentu, laki-laki selalu dianggap mempunyai peran sentral dalam meningkatkan status perempuan. Pandangan patriarki ini menyatakan bahwa perempuan harus mendampingi laki-laki untuk menjaga keberlanjutan, keunggulan, rasa hormat, otoritas, memenuhi tanggung jawab, dan mengekspresikan emosi guna menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam kerangka sosial<sup>23</sup>.

Patriarki adalah sebuah konsep yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya

---

<sup>21</sup> Wawanacara Samsul Anwar, MA. Pol., Tenaga Ahli Anggota DPR RI H.M Syamsul Lutfi, Dilaksanakan Pada tanggal 23 Juli 2023 di Jakarta.

<sup>22</sup> WJ Goode, *Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Bumi Aksara) h. 18

<sup>23</sup> Spardley, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta Pustaka Belajar, 2007) h.34

antropologi dan studi feminis, untuk merujuk pada distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, laki-laki dianggap lebih unggul dalam satu atau lebih aspek atau penugasan pekerjaan berbeda yang ditentukan oleh perbedaan gender. Alternatifnya, patriarki diartikan sebagai sistem hubungan gender dalam masyarakat yang menunjukkan ketidaksetaraan gender, dimana laki-laki mendominasi semua peran.<sup>24</sup>

Gagasan patriarki terkadang menjadi perdebatan karena kesalahpahaman. Secara khusus, konsep patriarki sering disalahpahami karena adanya asumsi bahwa analisis yang menggunakan konsep ini harus bersifat universal dan esensial, mereduksi perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan menjadi sekadar perbedaan biologis, dan mengabaikan perbedaan konteks temporal di mana terjadi perubahan pola relasi gender. Misalnya, konsep kebebasan dan kemandirian perempuan dalam Islam sering disalahartikan. Kebebasan ini sering disamakan dengan kebebasan berinteraksi dengan lawan jenis dan kebebasan menggunakan tubuh untuk tujuan seksual. Dampaknya adalah munculnya fenomena dimana perempuan mempertontonkan kecantikan fisiknya untuk tujuan komersial dan menjadi objek kapitalisme.<sup>25</sup>

Dewasa ini pun budaya patriarki sudah mendarah daging hingga terbawa sampai kepada ruang-ruang politik yang menjadikan bahwa perspektif terhadap orientasi gender dalam politik hanya kepada jenis kelamin saja yaitu laki-laki. Tentunya ini sebuah ironi ketika pandangan pemimpin itu harus laki-laki terus lestari dan berkembang di tengah masyarakat kita.

Dampak dari itu semua ini adalah di dalam ranah pemerintahan baik itu legislatif, eksekutif bahkan sampai ranah yudikatif peran laki-laki masih sangat dominan. Meskipun pemerintah Indonesia sendiri telah menerapkan peraturan *affirmatif action* yaitu keterwakilan perempuan sebanyak 30% di dalam parlemen ataupun persyaratan pendirian organisasi politik. Namun realitanya adalah seringkali hal tersebut hanya menjadi formalitas pemenuhan kuota saja, secara substansial jauh dari kata efektif.

Dalam hal ini ketika berbicara konteks masyarakat NTB dan mengapa Siti Rohmi Djalillah selaku kader NWDI yang berpasangan dengan Zulkieflymansyah berpotensi menjadi calon gubernur namun dengan drama politik yang panjang sehingga pada akhirnya dipasangkan sebagai wakil untuk mendampingi Zul dalam kontestasi Pilgub NTB. Alasan utamanya dikarenakan masyarakat NTB ketika dilakukan survei internal yang hasilnya sebagian besar tidak menghendaki adanya pemimpin perempuan. Sehingga Rohmi legowo untuk tetap ikut berkontestasi meskipun hanya memiliki daya tawar sebagai wakil.

Menurut Anwar sebagai tim pemenang pada saat itu, kondisi sosio-kultural masyarakat NTB yang masih terkungkung dengan budaya patriarki dilihat sebagai sebuah kelemahan dan jika dipaksakan maka kemungkinan besar akan mengalami kekalahan. Bahkan dari segi pengalaman, Siti Rohmi belum pernah memegang jabatan eksekutif dibandingkan dengan lawan-lawannya yang pernah menjadi kepala daerah seperti Suhaili pernah menjabat sebagai Bupati Lombok Tengah, Ahyar Abduh pernah menjabat sebagai Walikota Mataram dan Ali BD Pernah menjabat sebagai Bupati Lombok Timur. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap persepsi masyarakat NTB

---

<sup>24</sup> Ria Manurung, *Kekerasan Perempuan Pada Masyarakat Multi Etnik*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependidikan UGM, 2002) h.131

<sup>25</sup> Musda Mulia, *Indahnya Islam: Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*. (Jakarta: Megawati Institute, 2014) h.43

apalagi ketiga pesaingnya adalah laki-laki.

## 2. Faktor Pengalaman

Menyambung dari pernyataan di atas dari sudut pandang lawan. Sementara dari paangannya sendiri Zulkieflymansyah memang mungkin terdengar asing di telinga masyarakat NTB pada saat itu. Namun dalam kancah perpolitikan nasional beliau merupakan salah satu politisi dari Partai Keadilan Sejahtera yang namanya cukup diperhitungkan. Bahkan beliau berani bertarung melawan Ratu Atut yang notebene terkenal sebagai penguasa Banten. Pada saat itu beliau masih berusia 34 tahun yang berpasangan dengan Marisa Haque. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan namun keberaniannya patut diacungi jempol.

Selain itu pengalaman beliau sebagai anggota DPR RI 3 periode dapil Banten 2. Sehingga dari segi pengalaman dan jam terbang sebagai politisi yang telah malang melintang dikancah nasional dalam membaca eskalasi politik di NTB tidak ragukan lagi. Bahkan sejak masih duduk di bangku kuliah beliau pernah menduduki jabatan sebagai senator mahasiswa Universitas Indonesia.

Hal ini terbukti melalu metode kampanye yang beliau lakukan yaitu turun langsung menemui masyarakat dengan 7-8 titik perhari. Menurut Ihsan Hamid hal itu efektif mengingat Zulkieflymansyah kurang populer di kalangan masyarakat NTB khususnya Lombok, Namun hal ini juga menurut Ihsan Hamid sebagai sebuah naluri politik Zulkeflimansyah sebagai politisi yang berpengalaman. Sehingga dikatakannya pasangan ini adalah paket lengkap pengalaman, kompetensi dan representasi Sumbawa-Lombok.<sup>26</sup>

## Kesimpulan

Setiap kontestasi politik banyak sekali variabel yang terlibat dalam proses kemenangan salah satu pasangan calon, salah satunya adalah civil society. Variabel ini menjelma menjadi suatu kekuatan politik yang diperhitungkan keberadaannya. Salah dua civil society terbesar di Indonesia yang selalu menjadi incaran para politisi untuk didekati yaitu NU dan Muhammadiyah.

Studi kasus Pilkada NTB tahun 2018 diwarnai dengan berbagai elemen kekuatan masing-masing calon untuk memenangi pertarungan. Salah satunya adalah NW yang memegang peranan penting dalam kemenangan Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalillah. Alasan utamanya adalah karena organisasi ini memiliki basis massa terbesar dan dikenal sangat militan terhadap titah organisasi. Siti Rohmi yang merupakan seorang kader ideologis karena merupakan cucu dari kakek pendiri NW yaitu Syekh Zainuddin Abdul Majid tentunya mendapat dukungan penuh dari seluruh kalangan NW. Tanpa terkecuali TGB yang merupakan mantan Gubernur NTB 2 periode mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam istilah politik sampai turun gunung. Kondisi masyarakat NTB yang

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Dr. Ihsan, M.A. Pol., Pengamat Politik UIN Mataram, pada Tanggal 2 Januari 2024 Via Zoom Meeting.

sebagian besar merupakan masyarakat tradisonal membuat ketokohan pemimpin organisasi sangat berpengaruh. TGB yang menjadi tokoh prefrensi pemimpin ideal yang pada akhirnya di ikuti oleh jemaah NW dan sebagian masyarakat NTB yang melihat ketokohan dari seorang TGB. Jadi Istilah turun gunung menjadi tepat untuk menganalogikan apa yang dilakukan oleh TGB untuk memenangkan Zul-Rohmi atau istilah lain yaitu TGB effect. Kemudian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kedua yaitu terdapat dua point penting yaitu masyarakat patriarki dan kurangnya pengalaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa alasan utama mengapa pada akhirnya Siti Rohmi Djalillah menjadi Cawagub mendampingi Zulkeflimansyah yaitu karena masyarakat NTB masih menganut budaya patriarki dan tidak menghendaki pemimpin perempuan untuk menduduki kursi NTB I. Kemudian pengalaman dan jam terbang menjadi salah satu faktor karena jika dibandingkan dengan pengalaman yang dimiliki oleh Zulkeflimansyah menjadi daya tawar tersendiri dan inti dari semua itu adalah budaya patriarki yang mendarah daging menjadi faktor utama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Algappa, M. *Civil society And Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Space*. USA: Stanford University Press, 2004
- Asfar, Muhammad. *Model-Model Sistem Pemilihan di Indonesia*. Surabaya: Pusat Studi Demokrasi dan HAM., 2000.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Culla, Adi Suryadi. *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Onrop di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- Culla, Adi Suyadi. *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo, 1999.
- Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Kumolo, T. *Politik Hukum Pilkada Serentak*. Jakarta: PT Mizan Publika., 2015
- Labolo, Dr. Muhadam dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Madjid, Nurcholish, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina, 1999
- Nu'man, A. H.. *Riwayat Hidup dan Perjuangan TGKH, M. Zainuddin Abdul Majid*. Pancor: PBNW, 1999.
- Nurmandi, Achmad dkk, "*Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik Sebagai Amal dan Usaha*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Pamungkas, Sigit. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welafarism, 2011.
- Pito, Toni Adrianus, Efriza, dan Kemal Fasyah, *Mengenal Teori-Teori Poltik*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2013.
- Prayudi, d. *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.
- Rais, Amien, *Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Santana K., Septiawan. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Teori, Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, Makassar: Sekolah Tinggi Teologia Haffray, 2020.

### Jurnal

- Aktara, A.. "Politik Tuan Guru di Nusa Tenggara Barat". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2*. September 2015
- Ekawati, Esty. "Nahdlatul Ulama (NU) Sebagai Civil Society di Indonesia", *Jurnal Nuansa*, Volume 13, Nomor 2. Desember 2016
- Fahrurrozi.. "Diaspora Politik Nahdlatul Wathan Pada Pemilu Legislatif 2104 di Lombok, Nusa Tenggara Barat". *Jurnal Afkaruna*, Volume 13 Nomor 1, April 2017
- Mochammad Parmudi, "Kebangkitan Civil Society di Indonesia" *jurnal At-Taqaddum*, volume 7, Nomor 2. November 2015.
- Nopyandri, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945", *Jurnal Hukum*. Volume 2 Nomor 2. Januari 2011
- Zaenal Arifin Husen, "Pemilu Kepala Daerah Dalam Transisi demokrasi" *Jurnal Kontitusi*, Vol 7 Nomor 6. Desember 2010.



### Tesis

Anwar, M. S. "Dinamika Peran Politik Tuan Guru di Lombok era Reformasi". *Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016

### Skripsi

Rahayu, Y. C. "Peran Nahdlatul Wathan Terhadap Kemenangan Tuan Guru Bajang Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Nusa Tenggara Barat Tahun 2008". *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2013.

Saputra, T. B. "Peran Politik NU dalam Pemenangan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko dalam Pilkada Banyuwangi". *Skripsi Universitas Airlangga*, 2019

### Artikel

CNN Indonesia, "KPU Tetapkan Zul-Rohmi Menang Pilgub NTB 2018", diakses pada tanggal 30 November 2022, pukul 11.35 WIB dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180709062528-32-312587/kpu-tetapkan-zul-rohmi-menang-pilgub-ntb-2018>

Jdih Kementerian Keuangan, "Penjelasan atas Undang-Undang tentang Pemilihan Umum" diakses pada tanggal 30 November 2022 dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/10TAHUN2008UUPenj.htm#:~:text=sesuai%20ketentuan%20Pasal%2022E%20ayat,dan%20adil%20setiap%20lima%20tahun>.

### Dokumen Resmi

Arsip Nasional Republik Indonesia. (2015). *Guide Arsip Pemilihan Umum 1955-1999*. Jakarta: Arsip Nasional RI.

### Wawancara

Wawancara dengan Samsul Anwar, M.A. Pol, Tenaga Ahli Anggota DPR RI H.M Syamsul Lutfi, 23 Juli 2023.

Wawancara dengan Dr. Ihsan, M.A. Pol, Pengamat Politik UIN Mataram, 2 Januari 2023

Wawancara dengan TGH. Azhari, LC, Pengurus NW sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abidin Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, 4 Januari 2024.